



Kami bangsa Indonesia dengan  
menjatakan kemerdekaan Indonesia  
yang menandai  
kebebasan d.l.l. <sup>perjuangan</sup>  
jaya suber <sup>disesuaikan</sup> dan dalam  
tempoh yang sesingkat-singkat  
nya.  
Djakarta, 17-8-'05  
Wakil<sup>2</sup> bangsa Indonesia

# Sejarah Indonesia Kontemporer

Dari Proklamasi sampai Reformasi

Khoirun Nikmah, M.Hum.



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **SEJARAH INDONESIA KONTEMPORER**

**Dari Proklamasi  
Sampai Reformasi**

Khoirun Nikmah, M.Hum.

Publica Indonesia Utama  
2025

---

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 51 Hlm; 14,8 X 21 cm

**ISBN: 978-634-7386-38-0**

Cetakan Pertama, November 2025

### **Sejarah Indonesia Kontemporer: Dari Proklamasi Sampai Reformasi**

Penulis : Khoirun Nikmah, M.Hum.

Penyunting : Riska Oktavia

Penata halaman : M. Nur Alfian Halim

Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

[publicaindonesiautama@gmail.com](mailto:publicaindonesiautama@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini yang berjudul *“Sejarah Indonesia Kontemporer”*: *Dari Proklamasi ke Reformasi*. Buku ini disusun sebagai upaya menghadirkan bahan ajar yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa dalam mempelajari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia sejak tahun 1945 hingga era Reformasi.

Sebagai dosen yang telah mengampu mata kuliah **Sejarah Indonesia Kontemporer** sejak tahun **2019**, penulis merasakan perlunya sumber belajar yang tidak hanya menyajikan fakta-fakta sejarah, tetapi juga menumbuhkan kemampuan analitis mahasiswa terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam setiap periode. Oleh karena itu, buku ajar ini disusun dengan pendekatan kronologis sekaligus tematik agar mahasiswa dapat memahami kesinambungan dan perubahan dalam dan Bangsa Indonesia pascaproklamasi.

Isi buku ini meliputi berbagai fase penting dalam sejarah Indonesia modern, mulai dari masa awal kemerdekaan, periode demokrasi liberal dan terpimpin, masa Orde Baru, hingga lahirnya era Reformasi. Setiap bab dilengkapi dengan penjelasan konteks historis, analisis kritis, serta refleksi terhadap nilai-nilai kebangsaan yang dapat diambil dari pengalaman sejarah tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan

manfaat bagi mahasiswa, dosen, maupun pembaca umum yang ingin memahami lebih dalam dinamika sejarah Indonesia kontemporer.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperkaya khazanah literatur sejarah Indonesia.

Khoirun Nikmah

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>Bab I</b>	
<b>Indonesia Pascaproklamasi (1945–1950) .....</b>	<b>1</b>
A. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Alat Kelengkapan Negara .....	1
B. Keadaan Ekonomi Pascakemerdekaan .....	5
C. Perjuangan Bersenjata Rakyat Indonesia pada Awal Kemerdekaan .....	7
D. Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949) .....	10
E. Konferensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan .....	13
<b>Bab II</b>	
<b>Demokrasi Liberal (1950-1959).....</b>	<b>15</b>
A. Sistem Parlementer dan Dinamika Politik .....	15
B. Partai Politik dan Pemilu 1955 .....	16
C. Problematika Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal .....	16
D. Disintegrasi Nasional .....	18
<b>Bab III</b>	
<b>Demokrasi Terpimpin (1959–1965).....</b>	<b>21</b>
A. Dekret Presiden 5 Juli 1959 .....	21
B. Politik Luar Negeri dan Konfrontasi .....	22
C. Pembebasan Irian Barat. ....	24
D. G30S/1965 dan Keruntuhan Demokrasi Terpimpin .....	25
E. Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) .....	25
F. Demo mahasiswa .....	26

**Bab IV**

<b>Orde Baru (1966–1998)</b> .....	<b>29</b>
A. Lahirnya Orde .....	29
B. Masa Keemasan Orde Baru (1976-1988) .....	33
C. Kejatuhan Orde Baru .....	34

**Bab V**

<b>Reformasi (1998–2019)</b> .....	<b>37</b>
A. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998–1999) .....	37
B. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999–2001) .....	38
C. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004) .....	40
D. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) .....	41
E. Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2019) .....	42
Latian Soal .....	45
Daftar Pustaka .....	49
Biografi Penulis .....	51

# BAB I

## INDONESIA PASCAPROKLAMASI (1945–1950)

### A. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Alat Kelengkapan Negara

Pada tahun 1944, posisi Jepang (Nippon) dalam perang pasifik mulai terdesak oleh pasukan Sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar tetap mendukung mereka, pemerintah Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada 23 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam Bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Junbi Chosakai*. Lembaga ini diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, dengan Ichibangase dari pihak Jepang dan R.P. Soeroso sebagai wakil ketua.

Persetujuan resmi pembentukan BPUPKI dikeluarkan oleh Kaisar Jepang pada 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada 28 Mei 1945 di gedung bekas *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Jakarta. Dalam sidang tersebut, para anggota membahas berbagai gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka.

Dalam suasana pergulatan pemikiran itulah, Ir. Soekarno merenungkan hakikat dasar negara yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Dikisahkan bahwa di Pulau Flores, tempat ia pernah diasingkan, Soekarno kerap menghabiskan waktu di bawah sebuah pohon besar untuk mencari inspirasi. Dari perenungan mendalam tersebut, lahirlah gagasan mengenai lima prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kemudian disebut Pancasila.

Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya di depan sidang BPUPKI dan memperkenalkan kelima sila tersebut sebagai dasar filosofis bagi Negara Indonesia. Gagasan ini diterima dengan antusias oleh para peserta sidang karena dianggap mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) beserta pembukaannya, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dari hasil sidang-sidang inilah fondasi bagi lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk secara konseptual dan yuridis.

Pada 8 Agustus 1945 Jendral Terauchi, panglima tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara, memanggil Soekarno ke markas besarnya di Saigon. Pesawat menerbangkan Soekarno, Dr. Suharto (dokternya Soekarno) dan Hatta penuh sesak bersama 20 pembesar militer. Berangkat pukul 5 pagi dengan rahasia. Pukul tujuh malam tiba di Saigon, dengan cuaca buruk. Pesawat mendarat dengan tidak mulus, semua penumpang luka-luka dan memar. Pagi harinya di Dalat, Mersekal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Kaisar menyerahkan proses kemerdekaan di tangan Soekarno Hatta. Di Saigon Soekarno sudah merencanakan seluruh pekerjaan di jalan pada tanggal 17 Agustus. Soekarno yang percaya mistik, 17 adalah angka suci, angka keramat. Pertama-tama karena bulan suci ramadan, pada hari Jumat Legi, Jumat yang manis, Jumat yang suci. Al-Qur'an diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari.

Soekarno, Hatta, dan Dr. Suharto kembali ke Jakarta dengan naik pesawat tempur yang penuh lubang bekas peluru, tidak ada pendingin, dan penghangat udara, tidak ada alat pengaman, dan tidak ada toilet, Soekarno yang sangat ingin buang air kecil, akhirnya buang air kecil dilubang bekas peluru.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno tiba di Jakarta, pada 15 Agustus Jepang menyerah pada sekutu setelah kota Hiroshima

dan Nagasaki di bom. Para pemuda datang di kediaman Soekarno, mereka mendesak segera angkat senjata, mengobarkan revolusi. Para pemuda pengancam Soekarno dengan membawa golok dan pisau, bung Karno tidak takut dan menyerahkan kepalanya dengan berkata: "Silahkan potong!" Pemuda-pemuda pun takut dengan sikap Soekarno.

Sahrir menyiarkan selebaran penyerahan Jepang di hari terakhir yang sangat menegangkan. Pada pagi buta saat Soekarno makan sahur, masukkan gerombolan pemuda. Soekarno membawa pisau panjang dan pistol, para pemuda melarikan Bung Karno ke luar kota dengan dalih menyelamatkan Soekarno dari tentara Jepang. Soekarno marah dan kecewa, karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya, padahal Soekarno telah memberi nasihat para pemuda semalaman, tapi tidak ada hasilnya. Para pemuda yang tergesa-gesa membawa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur yang masih sembilan bulan ke Rengasdengklok, Soekarno diberi seragam yang kekecilan untuk dipakai agar tidak dicurigai Jepang. Hatta juga dibawa dengan mobil. Dari mobil berganti ke truk militer. Kemudian diteruskan ke Rengasdengklok, ke rumah petani Tionghoa. Tidak terjadi apa-apa di Jakarta, sampai mereka berbuka puasa, Ahmad Subarjo datang untuk menjemput Bung Karno. Melalui Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman untuk menyusun Proklamasi. Sukarni berjalan pulang ke Jakarta melihat api yang berkobar-kobar, dikiranya benar ada revolusi yang terjadi, ternyata setelah diperiksa lebih dekat, seorang petani membakar jerami.

Kekosongan kekuasaan di Indonesia kemudian dimanfaatkan oleh pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan di kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan teks Proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah oleh Jepang,

namun kemerdekaan ini diperoleh dari usaha Bangsa Indonesia sendiri.

Setelah Proklamasi, tugas berikutnya adalah membentuk alat kelengkapan negara. Pada 18 Agustus 1945, dilaksanakan kembali sidang PPKI. Para peserta sidang secara bulat memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden secara aklamasi. Sidang membahas rancangan UUD untuk Negara Indonesia. 19 Agustus 1945, dalam sidang PPKI, menetapkan delapan provinsi yang ada di Indonesia, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Delapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Pada 22 Agustus 1945, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP diresmikan pada 29 Agustus 1945, di Gedung Kesenian Jakarta. Ketua KNIP terpilih yakni Kasman Singodimejo. Komite Nasional di daerah gagal dibentuk karena situasi keamanan yang tidak menentu. Tanggal 2 September 1945 KNIP membentuk kabinet presidensial RI yang pertama dengan Sahrir menjadi perdana menteri. Maklumat Pemerintah 14 November 1945.

Kabinet presidensial pertama ini ditetapkan pada 2 September 1945. Usia kabinet hanya sampai tanggal 14 November 1945 karena dipengaruhi golongan sosial, dalam KNIP. Sejak itu, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem kabinet parlementer dengan Perdana Menteri, Sutan Syahrir. Pembentukan pemerintah parlementer diharapkan mengurangi peranan presiden yang terlalu besar. UUD 1945 tahap pertama, terdapat sembilan kali pergantian kabinet. 1) Kabinet presidensial pertama. 2) September 14 November 1945. 2) Kabinet Syahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946. 3) Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946-20 Oktober 1946. 4) Kabinet Syahrir III, 20 Oktober 1946-27 Juni 1947. 5) Kabinet Amir Syarifudin I, 3 Juli 1947-11 November 1947. 6) Kabinet Amir Syarifudin II, 11 November 1947-29 Januari

1948. 7) Kabinet Hatta I (Presidensial), 29 Januari 1948-4 Agustus 1948. 8) Kabinet Darurat (PDRI), 19 Desember 1948-13 Juli 1949. 9) Kabinet Hatta II (Presidensial), 4-20 Agustus 1949.

Partai politik juga dibentuk, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI). Sidang PPKI juga memutuskan membentuk BKR yang terdiri dari mantan anggota PETA, Heiho, Keibodan, KNIL, dan Seinendan. Pada awalnya, partai di Indonesia hanyalah Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI sebagai partai tunggal, dengan Soekarno sebagai ketuanya. Namun, berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membentuk partai politik. Setelah itu, muncul banyak partai politik, seperti; Masyumi, PKI, PBI, PRJ, PARKINDO, Partai Sosialis Indonesia (Parsi), Partai Rakyat Sosialis (Paras), PKRI, Persatuan Rakyat Marhein (Permai), dan PNI.

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk pada 20 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Ketua BKR yakni Kasman Singodimejo, bekas Daidanco Jakarta. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Oerip Soemoharjo diangkat sebagai kepala staf umum. Oerip Soemohardjo membentuk markas tertinggi TKR di Yogyakarta. Pada bulan November 1945, Jenderal Soedirman terpilih menjadi pemimpin TKR. Dalam perjalanannya, TKR mengalami dua kali pergantian nama, yaitu Tentara Keselamatan Rakyat dan Tentara Republik Indonesia. Pada 7 Juni 1947, pemerintah mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia.

## **B. Keadaan Ekonomi Pascakemerdekaan**

Belanda belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia. Untuk mengancam pemerintah Indonesia, Belanda melakukan blokade ekonomi melalui jalur laut pada November 1945. Tujuan Blokade ini mencegah masuknya senjata dan peralatan militer

ke Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Akibat dari tindakan Belanda, menyebabkan kekosongan kas RI. Pemerintah RI berupaya menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan diplomasi beras dengan India. Pada saat itu, India mengalami kelaparan. Untuk itu, Indonesia bersedia membantu India dengan mengespor beras murah. Sebagai gantinya, India akan mengirim bahan pakaian ke Indonesia.

### **Pembentukan Badan Perancang Ekonomi (*Planning Board*)**

Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Adnan Kapau Gani. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Semua pemikiran itu belum dapat terealisasi dengan baik karena adanya agresi militer dari Belanda.

Pemerintah membentuk pelaksanaan rencana Kasimo (*Kasimo Plan*). Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J Kasimo. Rencana ini diwujudkan melalui swasembada pangan dari 1948-1950. Upaya yang dilakukan adalah menanami tanah kosong di Sumatera, melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul, transmigrasi, dan setiap desa dibentuk kebun bibit.

Pemerintah mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI). ORI dikeluarkan pemerintah RI pada tahun 1946. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri, termasuk dalam hal keuangan dan moneter. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penerbitan mata uang sendiri, yaitu **Oeang Republik Indonesia (ORI)**. Kebijakan ini menjadi simbol nyata kedaulatan ekonomi sekaligus alat untuk menggantikan uang Jepang dan uang NICA yang masih beredar di masyarakat.

ORI secara resmi diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada **30 Oktober 1946** dan mulai diedarkan pada **tanggal 1 November 1946**. Menteri Keuangan saat itu, **A.A. Maramis**, memimpin langsung proses penerbitannya. Nilai tukar yang ditetapkan adalah **satu ORI setara dengan 50 rupiah Jepang**. Tujuan utama penerbitan ORI adalah untuk menegaskan kemandirian ekonomi nasional, menstabilkan keuangan negara, dan memperkuat posisi politik Republik Indonesia di tengah tekanan Belanda yang masih berusaha menguasai wilayah Indonesia.

Selain sebagai alat transaksi resmi, ORI juga memiliki makna historis dan simbolik yang sangat mendalam. Setiap lembar ORI mencerminkan semangat perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan, karena pada masa itu pencetakannya dilakukan secara rahasia di berbagai daerah dengan sarana yang terbatas. Uang ini menjadi bukti nyata bahwa Republik Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga memiliki sistem ekonomi dan keuangan yang berdaulat.

### **C. Perjuangan Bersenjata Rakyat Indonesia pada Awal Kemerdekaan**

#### ***Peristiwa-Peristiwa Penting dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1945-1946)***

##### **Pertempuran Surabaya (10 November 1945)**

Latar belakang pertempuran besar di Surabaya berawal dari pengkhianatan pasukan Inggris yang membawa serta NICA (*Nederlandsch Indische Civiele Administratie*). Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur R.M.T.A. Soerjo, dan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby telah mencapai kesepakatan agar tidak terjadi bentrokan bersenjata. Namun, pasukan NICA justru menyebarkan selebaran dari udara yang berisi perintah bagi rakyat Surabaya untuk menyerahkan diri kepada Sekutu. Tindakan provokatif

ini memancing kemarahan para pemuda Surabaya. Puncaknya terjadi ketika bendera Belanda berwarna merah putih biru dikibarkan di atas Hotel Yamato. Para pejuang segera memanjat ke atap hotel dan merobek bagian birunya, menyisakan merah putih sebagai lambang kedaulatan Indonesia. Ketegangan meningkat hingga pada 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Mallaby tertembak dan ia tewas di tempat. Peristiwa tersebut memicu kemarahan Inggris dan memicu pertempuran besar pada 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan.

### **Peristiwa Merah Putih Manado**

Setelah mendengar kabar Proklamasi kemerdekaan, rakyat Minahasa, Sulawesi Utara, segera mengambil alih senjata dari tangan tentara Jepang. Kedatangan NICA ke Manado dengan sikap arogan memicu kemarahan masyarakat. Gubernur Sulawesi, Dr. Sam Ratulangi, menyerukan pembentukan organisasi rakyat serta memprakarsai petisi yang menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Akibat sikap tegasnya itu, Sam Ratulangi ditangkap oleh pasukan Sekutu dan kemudian diasingkan ke Serui, Papua, pada tahun 1946. Peristiwa ini dikenal sebagai gerakan Merah Putih Manado yang mencerminkan semangat rakyat Sulawesi dalam mempertahankan kemerdekaan.

### **Bandung Lautan Api (23 Maret 1946)**

Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946 sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap Sekutu dan NICA yang berusaha menguasai Kota Bandung. Para pejuang memutuskan untuk membumihanguskan wilayah Bandung bagian selatan agar tidak digunakan oleh pihak musuh sebagai basis pertahanan. Aksi heroik ini menunjukkan tekad rakyat Bandung untuk mempertahankan kemerdekaan dengan semboyan “lebih baik hancur daripada dijajah kembali.” Kota Bandung pun terbakar, dan dari peristiwa inilah muncul julukan “Bandung Lautan Api”.

### **Puputan Margarana (Bali, 20 November 1946)**

Pertempuran di Margarana, Tabanan, Bali, dipicu oleh penolakan rakyat Bali terhadap upaya Belanda yang ingin menguasai pulau tersebut setelah disepakatinya Perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian itu, kedaulatan Indonesia hanya diakui atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura, sehingga tidak masuknya Bali menimbulkan kekecewaan mendalam. I Gusti Ngurah Rai, sebagai pemimpin pasukan Ciung Wanara, menolak keras dominasi Belanda dan melancarkan perlawanan bersenjata. Pertempuran besar meletus pada 20 November 1946 dan dikenal sebagai “Puputan Margarana,” yang berarti perang sampai titik darah penghabisan demi kehormatan bangsa dan kemerdekaan Indonesia.

### **Peristiwa Westerling di Makassar (Desember 1946)**

Tragedi Westerling di Sulawesi Selatan merupakan perlawanan rakyat terhadap pembentukan Negara Indonesia Timur yang diinisiasi Belanda. Pasukan Belanda di bawah komando Raymond Westerling melakukan operasi militer brutal dengan dalih menumpas pemberontakan. Dalam kenyataannya, tindakan tersebut berubah menjadi pembantaian massal terhadap rakyat yang menolak dominasi Belanda. Antara 7-25 Desember 1946, ribuan warga sipil tewas diperkirakan mencapai 40.000 orang. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

### **Pertempuran Medan Area**

Pertempuran di Medan dipicu oleh kedatangan pasukan Sekutu yang semula bertugas membebaskan tawanan perang di Sumatera. Akan tetapi, Sekutu yang disertai NICA justru mempersenjatai kembali para tahanan Belanda yang telah dibebaskan. Tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan

mendalam dari Gubernur Sumatera, Teuku Mohammad Hasan, serta kemarahan para pemuda di Medan. KNIL kemudian berupaya merebut kembali kota tersebut. Pertempuran sengit pun meletus antara pejuang Indonesia dan pasukan Inggris NICA. Wilayah Medan menjadi ajang perlawanan besar rakyat Sumatera Utara untuk mempertahankan kemerdekaan.

### **Palagan Ambarawa (November 1945)**

Pada 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethell mendarat di Semarang dengan alasan untuk mengevakuasi tawanan perang. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menyambut kedatangan mereka dan menyepakati perjanjian agar Sekutu tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar karena Sekutu justru mempersenjatai tawanan Belanda. Akibat pelanggaran ini, pecahlah pertempuran pada 20 November 1945 di Ambarawa antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu. Pertempuran ini kemudian dikenal sebagai Palagan Ambarawa, simbol kegigihan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

## **D. Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949)**

### **1. Perjanjian Linggarjati, Agresi Militer Belanda I**

Latar belakang perundingan ini karena banyaknya pertempuran di berbagai daerah. Perjanjian ini terjadi di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 10 November 1946. Penandatanganan perjanjian dari pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri, Sutan Syahrir, dan dari pihak Belanda diwakili oleh Scermerhorn. Isi perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di antaranya: Indonesia diakui wilayahnya secara *de facto* atas wilayah Jawa, Sumatera dan

Madura, Indonesia dan Belanda akan berkerja sama dalam pembentukan RIS.

Dampak perjanjian Linggarjati bagi Indonesia mengakibatkan wilayahnya menjadi sempit. Perdana Menteri Syahrir dikritik setelah Perjanjian Linggarjati. Akhirnya, Syahrir mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Namun, Belanda yang justru melanggar isi kesepakatan dalam Perjanjian Linggarjati, dengan melakukan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Untuk menghindari pertikaian yang berlarut-larut antara Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menyelesaikan perselisihan antara Belanda dan Indonesia. KTN dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947.

## **2. Perjanjian Renville Agresi Militer Belanda II dan Serangan Umum 1 Maret 1949**

Belanda ternyata melanggar isi Perjanjian Linggarjati, dengan melakukan Agresi. Hal ini menyebabkan hubungan di antara keduanya memburuk. Untuk mengatasi keadaan yang buruk, diadakanlah sebuah pertemuan. Tempat lokasi masih menjadi perdebatan Indonesia tidak mau melakukan perundingan di bumi Indonesia karena masih sengketa. Kemudian diputuskan tempat pelaksanaan pertemuan dilakukan di atas kapal USS Renville milik USA yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pertemuan ini dimulai pada 8 Desember 1947. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri, Amir Syarifuddin dan Abdulkadir Widjoyoatmojo dari Belanda. Isi perjanjian ini antara lain, Indonesia menyetujui dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan wilayahnya hanya terbatas Jogja, Jawa Barat, dan Sumatera.

Akibat perjanjian ini, Amir Syarifudin mendapatkan mosi tidak percaya dari kalangan parlementer dan dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Jabatan perdana menteri selanjutnya digantikan Mohammad Hatta.

Belanda, lagi-lagi mengingkari kesepakatan yang telah ditandatangani dalam Perjanjian Renville, dengan melakukan agresi militer yang kedua, tanggal 18 Desember 1948. Akibat Agresi ini bagi pihak Indonesia yakni: Ditangkapnya Soekarno Hatta, Sahrir.

Seperti yang diceritakan Bung Karno dalam biografinya, Pada 19 Desember 1948, Belanda mengebom Yogyakarta pukul 05.30. 1.000 pasukan payung menduduki kantor pos dan pemancar radio, membakar mobil-mobil. Panglima Sudirman yang pada saat itu berusia 30 tahun, membangunkan Soekarno. Beliau minta ijin untuk bergerilya masuk hutan. Sebelum telegraf diputus oleh Belanda, Soekarno berhasil mengirimkan surat ke Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat. Satu kali Soekarno mengirimkan telegraf ke Delhi. Dengan instruksi agar mengadakan hubungan dengan pemerintahan darurat di Sumatera.

Soekarno memanggil Mutahar ke kamarnya, Mutahar diperintahkan untuk menjaga bendera merah putih dengan sekuat jiwa raganya. Pada 13.30 tentara kolonial mengepung istana, dan membawa Soekarno, dan membawanya dengan menggunakan jip. Soekarno dibawa keruangan yang besar, dan diminta tentara RI untuk menyerah. Kemudian Soekarno dan 150 yang ada di istana, dikenakan tahanan rumah. Pada tanggal 22 Desember 1948 pukul tujuh pagi, Kolonel Van Langen memberi waktu lima menit untuk mengemas dua buah koper kecil, Soekarno naik ke atas pesawat B-25 bersama Agus Salim dan Sahrir menuju Brastagi, Sumut. Kemudian dipindah ke Prapat, pinggir danau Toba. Akhir Januari 1949 Soekarno dipindahkan ke Bangka dengan pesawat Catalina, di mana Hatta, Laksamana Udara Suryadarma, Ali Sastroamidjoyo ditahan di sana. Pada 1 Maret 1949 pasukan gerilya dapat menguasai Yogyakarta selama